

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan nasional yang sukses tentu tidak terlepas dari peran pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerahnya. Tujuan dari diberikannya otonomi yang nyata, dinamis, serasi serta bertanggung jawab kepada pemerintah daerah adalah untuk membantu pemerintah pusat agar terselenggara pemerintahan dan pembangunan di suatu daerah. Kegiatan pembangunan yang diselenggarakan di daerah agar terciptanya pelayanan publik yang lebih baik, tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit. Maka dari itu dibutuhkanlah sumber pembiayaan dari Pendapatan daerah untuk turut membangun pelayanan publik. Salah satu indikator yang dipandang mampu untuk mengetahui tingkat ketergantungan suatu daerah oleh pemerintah pusat adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan prinsipnya, semakin besar jumlah sumbangan PAD yang diberikan terhadap APBD maka semakin kecil tingkat ketergantungan daerah terhadap pusat. Begitu pula sebaliknya apabila sumbangan PAD yang diberikan terhadap APBD dalam jumlah kecil, maka hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih sangat bergantung pada pemerintah pusat.

Strategi otonomi daerah pemerintah pusat dapat menawarkan peluang bagi pembangunan ekonomi<sup>2</sup>. Namun, faktor terpenting dalam mewujudkan otonomi daerah adalah memahami potensi daerah<sup>3</sup>. Untuk membiayai pembangunan daerah dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat, maka semua sumber pendapatan daerah perlu dioptimalkan<sup>4</sup>.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber penerimaan asli daerah yang berasal dari daerah yang bersangkutan, dan harus terus dilakukan peningkatannya. Pemerintah daerah dapat memutuskan untuk berhenti bergantung pada pemerintah pusat untuk melakukan pembangunan daerah jika PAD tumbuh dengan baik dan cepat. Berlakunya Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang disempurnakan oleh Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah berpengaruh terhadap daerah tingkat II di seluruh Indonesia, mereka harus mampu membiayai pembangunan daerah masing – masing tanpa harus menunggu subsidi dari pemerintah pusat<sup>5</sup>.

---

<sup>2</sup> Hadhek Zouhaier, "Institutions, Investment and Economic Growth", *International Journal of Economic and Finance*, 4(2), 2012.

<sup>3</sup> Ni Luh Aprillia Kesuma dan I Made Suyana Utama, "Analisis Sektor Unggulan dan Pergeseran Pangsa Sektor – sektor Ekonomi Kabupaten Klungkung, *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 8(1), 2015.

<sup>4</sup> Muhammad Fajrii, Arman Delis dan Yohanes Vyn Amzar, "Dampak Otonomi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Keterbukaan Daerah Terhadap Ketimpangan Wilayah di Sumatera", *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 9(2), 2016.

<sup>5</sup> Undang – Undang tentang dana perimbangan keuangan, diakses melalui website <https://www.bappenas.go.id> pada Minggu, 05 September 2021 pukul 21.40

Purnomo berpendapat bahwa PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah berdasar pada peraturan daerah perundang – undangan <sup>6</sup>. Sedangkan Simanjuntak memberikan pernyataannya bahwa semakin besar kontribusi PAD dalam APBD, maka semakin kecil tingkat bergantungnya suatu daerah pada pemerintah pusat. Namun sebaliknya, apabila tingkat kontribusi PAD dalam APBD semakin rendah hal itu menandakan bahwa semakin besar bergantungnya suatu daerah terhadap pemerintah pusat. Sehingga peran pemerintah pusat cenderung lebih dominan dalam mengalokasikan anggaran ke daerah otonomi <sup>7</sup>.

Variabel yang bisa mempengaruhi PAD diantaranya adalah jumlah penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan gambaran dari perekonomian secara menyeluruh pada daerah <sup>8</sup> dan pertumbuhan ekonomi. Semakin banyak penduduk yang menghuni suatu daerah, maka aktivitas ekonominya juga semakin banyak dan sektor perekonomian tentunya juga meningkat yang berimbas pada sumber pendapatan daerah termasuk pajak. Sumber pendapatan masyarakat suatu daerah bisa membantu meningkatkan PAD yang berasal dari pajak. Meningkatnya PDRB dipengaruhi oleh banyaknya penduduk yang bekerja dan disertai dengan peningkatan output yang dihasilkan. Hal itu mampu

---

<sup>6</sup> Budi S. Purnomo, "Obligasi Daerah: Alternatif Investasi Bagi Masyarakat dan Sumber Pendanaan bagi Pemerintah Daerah (Panduan Praktis Penerbitan Obligasi Daerah)", Bandung: Alfabeta, 2009.

<sup>7</sup> Simanjuntak, Payaman J, "Masalah Upah dan Jaminan Sosial (dalam Undang-Undang yang Baru Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh)", Kantor Perburuhan Internasional, Jakarta, 2002.

<sup>8</sup> Robinson Tarigan, "Ekonomi Regional (teori dan aplikasi), Jakarta: Bumi Aksara, 2005

mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan perkapita di suatu daerah.

Pengeluaran pemerintah adalah salah satu variabel yang merupakan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa atau biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Selain itu, variabel lainnya yang berpengaruh adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan dana transfer dari pemerintah pusat agar pelaksanaan desentralisasi tercapai. Lalu, variabel berikutnya investasi yang merupakan pendorong bagi roda perekonomian yang berkaitan dengan peningkatan produksi dan kesempatan kerja.

Penelitian ini menggunakan enam objek penelitian tentang tiga kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur. Ketiga kabupaten tersebut adalah Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Ponorogo, yang mana ketiga kabupaten tersebut memiliki beberapa persamaan diantaranya adalah sebagian besar luas wilayahnya terdiri dari hutan dan lahan pertanian, serta dikelingi oleh pegunungan.

**Tabel 1.1**

**PAD Kab. Trenggalek, Kab. Tulungagung dan Kab. Ponorogo Tahun 2017-2020 (Juta Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Kab. Trenggalek</b>	<b>Kab. Tulungagung</b>	<b>Kab. Ponorogo</b>
2017-2018	233.708	453.027	258.842
2018-2019	285.034	486.260	290.751
2019-2020	257.561	510.448	294.914

*Sumber: BPS Kab. Trenggalek, BPS Kab. Tulungagung, BPS Kab. Ponorogo*

Pertumbuhan realisasi PAD Kabupaten Trenggalek dikatakan fluktuatif karena terjadi peningkatan yang cukup tinggi pada tahun 2018-

2019 yakni 285.034, namun menurun pada 257.561 pada tahun 2019-2020. Seperti yang telah dipaparkan pada tabel diatas, pertumbuhan PAD Kabupaten Tulungagung bisa dikatakan cukup baik karena terus mengalami peningkatan. Di tahun 2017-2018, pertumbuhan pendapatan asli daerah Kabupaten Tulungagung sebesar 453.027. Tahun berikutnya, 2018-2019 pertumbuhannya meningkat sebesar 486.260 dan pada tahun 2019-2020 mengalami peningkatan lagi, yaitu sebesar 510.448 yang mana peningkatan kali ini cukup tinggi jika dibandingkan dengan peningkatan di tahun – tahun sebelumnya.

Peningkatan pertumbuhan PAD juga dialami oleh Kabupaten Ponorogo. Dalam tabel diatas bisa dilihat bahwa pada tahun 2017-2018 pertumbuhan PAD mencapai 258.842. Kemudian pada tahun berikutnya yakni 2018-2019 PAD Kabupaten Ponorogo meningkat cukup tinggi yaitu sebesar 290.751. Lalu pada tahun 2019-2020 pertumbuhan PAD pada Kabupaten Ponorogo meningkat hingga 294.914. Jadi bisa dikatakan bahwa Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Ponorogo berhasil dalam mengupayakan kesejahteraan masyarakatnya dengan meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Karena apabila PAD semakin meningkat maka ketergantungan daerah pada pusat menjadi berkurang. Bukan berarti menurunnya pertumbuhan PAD pada Kabupaten Trenggalek karena pemerintah tidak mengupayakan kesejahteraan masyarakatnya, bisa jadi bahwa penurunan tersebut adalah salah satu upaya untuk meningkatkan PAD.

Pendapatan daerah yang diperoleh dan dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah disebut. Menurut Lutfi dalam penelitiannya, secara teoritik PAD adalah kontribusi yang diberikan oleh masyarakat untuk mendorong status otonom daerahnya. Dukungan tersebut berwujud besarnya perolehan PAD, dimana besarnya jumlah PAD tersebut memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mengelola administrasinya<sup>9</sup>.

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan, maka pada penelitian ini terdapat beberapa permasalahan yang menarik untuk dianalisis dan diteliti. Serta mendorong peneliti untuk melakukan penelitian mengenai **“Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum dan Investasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Tiga Kabupaten di Jawa Timur Tahun 2010-2020 (Kab. Trenggalek, Kab. Tulungagung dan Kab. Ponorogo)”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasar pada latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi mengenai masalah yang mungkin muncul dalam penelitian, agar pembahasan terarah maka penelitian ini membahas sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Achmad Lutfi, “Penyempurnaan Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: Suatu upaya dalam optimalisasi penerimaan PAD”, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi: Bisnis dan Birokrasi, Vol.XIV No.1, Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Januari 2006.

1. Pengembangan Pendapatan Asli Daerah di setiap daerah sangat diperlukan karena meningkatnya Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan dari tingkat kesuksesan daerah tersebut.
2. Beberapa variabel yang diperkirakan mempengaruhi pertumbuhan PAD berkembang tidak signifikan satu sama lain.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah yang diperoleh untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Jumlah Penduduk, PDRB, Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi, DAU, dan Investasi berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, dan Kabupaten Ponorogo pada tahun 2010-2020?
2. Apakah Jumlah Penduduk, PDRB, Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi, DAU, dan Investasi berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, dan Kabupaten Ponorogo pada tahun 2010-2020?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menguji Jumlah Penduduk, PDRB, Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, dan Investasi berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Ponorogo pada Tahun 2010-2020.

2. Untuk menguji Jumlah Penduduk, PDRB, Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, dan Investasi berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Ponorogo pada Tahun 2010-2020.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat penelitian secara teoritis.

Secara teoritis, penelitian ini bisa dimanfaatkan untuk pihak – pihak yang turut serta membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di bidang ekonomi dan bisnis terlebih dalam ekonomi pembangunan.

2. Manfaat penelitian secara praktis.

1. Pemerintah Kabupaten

Penelitian ini bisa digunakan sebagai salah satu referensi sebagai bahan evaluasi pengembangan sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Ponorogo.

2. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai referensi dalam membantu pemerintah daerah mengidentifikasi dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan daerah.

3. Peneliti selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi peneliti selanjutnya sebagai sumber informasi serta mampu untuk memberikan kontribusi keilmuan yang bisa membantu penelitian selanjutnya.

## **F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian**

Untuk membatasi masalah yang akan dibahas pada penelitian ini, maka pada penelitian ini difokuskan pada mayoritas variabel makro ekonomi.

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah penelitian yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari variabel jumlah penduduk, PDRB, pengeluaran pemerintah, pertumbuhan ekonomi, DAU, dan investasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini menggunakan tiga kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur yaitu Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, dan Kabupaten Ponorogo selama 10 tahun yang dimulai dari tahun 2010 hingga tahun 2020.

## **G. Penegasan Istilah**

### **1. Definisi Konseptual**

- a. Pendapatan Asli Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan bagian dari pendapatan daerah yang bersumber dari potensi daerah itu sendiri dan dikumpulkan berdasarkan peraturan daerah <sup>10</sup>.

---

<sup>10</sup> Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryani, "Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah", Yogyakarta: Deepublish, 2018, hlm. 10.

- b. Penduduk setiap orang yang telah tinggal di wilayah Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih, serta mereka yang tinggal kurang dari enam bulan tetapi berniat untuk menetap di wilayah Republik Indonesia <sup>11</sup>.
- c. Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah dari nilai tambah pada semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu selama periode waktu tertentu yang biasanya satu tahun <sup>12</sup>.
- d. Pengeluaran Pemerintah adalah aktivitas pengeluaran pemerintah yang melibatkan pembelian barang modal, produk konsumen dan jasa <sup>13</sup>.
- e. Pertumbuhan Ekonomi adalah pertumbuhan pendapatan nasional selama periode waktu tertentu, seperti satu tahun terakhir yang menunjukkan peningkatan jasa dan kapasitas produksi selama periode tersebut <sup>14</sup>.
- f. Dana Alokasi Umum adalah sejumlah dana tertentu yang setiap tahun dibagikan sebagai dana pembangunan kepada setiap daerah otonom (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia <sup>15</sup>.

---

<sup>11</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek

<sup>12</sup> R. Widodo Dwi Pramono, "Ekonomi Wilayah Untuk Perencanaan Tata Ruang", (Jakarta: Deepublish,2019), hlm.42.

<sup>13</sup> Effendie, "Keuangan Negara Suatu Tinjauan Komprehensif dan Terpadu", (Surabaya: Airlangga University Press,2017) hlm.31

<sup>14</sup> Dr. Patta Rapanna, S.E., M.Si. dan Zulfikry Sukarno S.E., M.M., "Ekonomi Pembangunan", Makassar: CV SAH MEDIA, 2017, hlm 7.

<sup>15</sup> Phaureula Artha Wulandari., hlm. 11

g. Investasi mempelajari bagaimana investor merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi investasinya atau mengelola kesejahteraan finansial perusahaan <sup>16</sup>.

## 2. Definisi Operasional

Penegasan istilah secara operasional dalam penelitian ini adalah “Analisis variabel yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Ponorogo”. Dalam penelitian ini mengidentifikasi apakah beberapa variabel bisa berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah dari tiga kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur.

## H. Sistematika Penulisan Skripsi

### 1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi ini terdiri dari sampul depan, sampul dalam, halaman persetujuan pembimbing, halaman persetujuan penguji, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran dan halaman abstrak.

### 2. Bagian Utama atau Inti Skripsi

#### BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang

---

<sup>16</sup> Dr. Wahyuni Sri Astutik, MM., “Manajemen Investasi”, Malang: Media Nusa Creative, 2020, hlm. 1

lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah serta sistematika penulisan skripsi.

## BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini membahas mengenai kajian dan teori terkait variabel Pendapatan Asli Daerah, Jumlah Penduduk, PDRB, Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, dan jumlah Investasi. Pada bab ini juga disertai dengan kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual serta dilengkapi dengan hipotesis penelitian.

## BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas pendekatan metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu menggunakan jenis penelitian kuantitatif asosiatif. Teknik yang digunakan adalah populasi, sampel, sampling, jenis dan sumber data, variabel, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data (panel data).

## BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai hasil dari pengujian yang telah dilakukan sebelumnya yang sesuai dengan rumusan masalah yakni, data tentang hipotesis telah sesuai dengan rumusan masalah mengenai jumlah penduduk, PDRB, pengeluaran pemerintah, pertumbuhan ekonomi, DAU, dan jumlah investasi berpengaruh signifikan secara parsial maupun berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Ponorogo pada tahun 2010-2020.

## BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai analisis yang sesuai dengan rumusan masalah serta telah sesuai dengan buku dan jurnal yaitu, jumlah penduduk, PDRB, pengeluaran pemerintah, pertumbuhan ekonomi, DAU, dan jumlah investasi berpengaruh signifikan secara parsial maupun berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Ponorogo pada tahun 2010-2020.

## BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan, saran dan rekomendasi terkait penelitian.